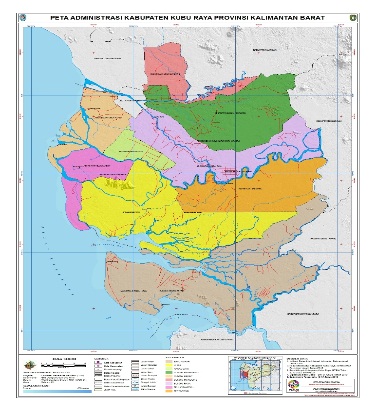
**RENCANA KERJA (RENJA)**

**TAHUN 2024**

**KECAMATAN KUALA MANDOR B**





****

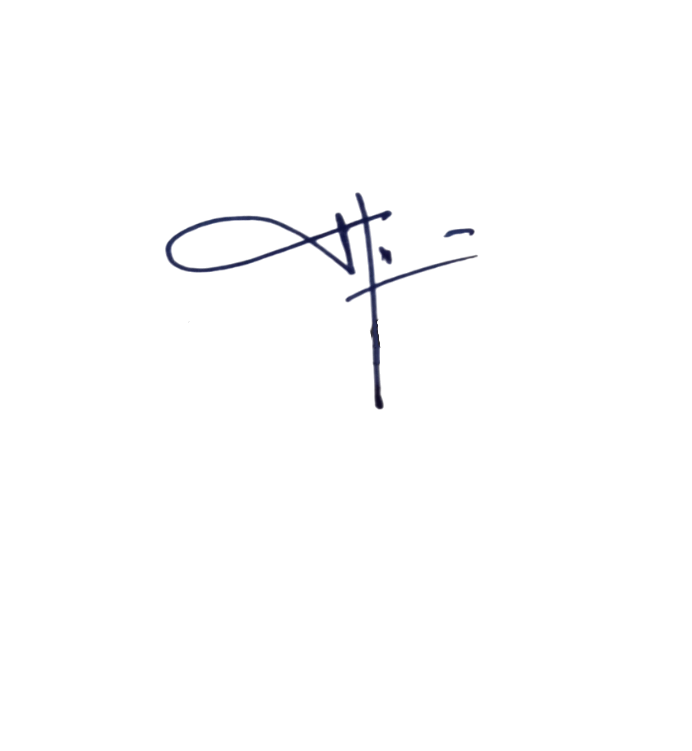
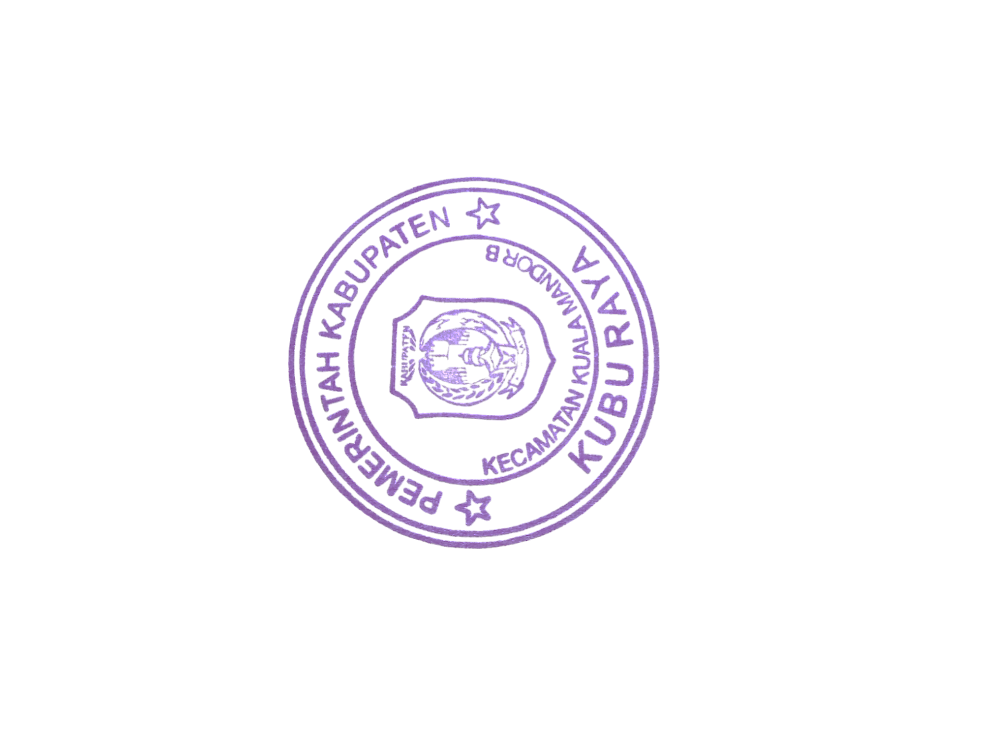
**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, sekaligus sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan dalam membuat dan mengambil kebijakan lebih lanjut dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini, kami ucapkan terima kasih



Kuala Mandor B, 2024

CAMAT KUALA MANDOR B

**MUHAMMAD, S.Sos., M.Si**

**NIP. 197304062006041006**

**DAFTAR ISI**

Hal

KATA PENGANTAR ………………………………………..…………………….. i

DAFTARISI ………..…………………………………………………………..…… ii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………………….1

B. Landasan Hukum 4

C. Maksud dan Tujuan 8

D. Sistematika Penulisan 8

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD..…………………………9

1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD……………...27
2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD………………………………...………29

1. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD……..30
2. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat…………………………………….......42

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 48

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 50

C. Program dan Kegiatan 53

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Alokasi Anggaran Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2024…………………………………………………..65

BAB V : PENUTUP

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Kuala Mandor B mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuala Mandor B sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Kuala Mandor B mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya. Rencana Kerja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

**Gambar 1.1**

**Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA**



* 1. **Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
29. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 61)
30. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.
    1. **Maksud Dan Tujuan**
31. **Maksud**

Sebagai pedoman dan arah bagi Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2019 - 2024.

1. **Tujuan**

Memperlancar tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sebagai unsur penunjang pemerintah kabupaten Kubu Raya dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2024.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD , RPJMD, dan RKPD, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Kuala Mandor B yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUALA MANDOR B TAHUN 2024

Bab ini menggambarkan hasil realisasi dan usulan program dan kegiatan Kecamatan Kuala Mandor B, yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Kuala Mandor B, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sub bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional berdasarkan RKP Tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2019 – 2024. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target Tahun 2024.

3.3. Program dan Kegiatan

Sub Bab ini memuat program dan kegiatan yang diuraikan secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan.
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Program serta Kegiatan Kecamatan Kuala Mandor B Tahun Anggaran 2024

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUALA MANDOR B TAHUN LALU**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kuala mandor B Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Kuala mandor B**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya mendapat alokasi anggaran **Rp. 2.758.033.814,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.737.769.756,00** atau sebesar **99,27%** yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar **Rp. 2.110.503.553,00** dengan Realisasi **Rp. 2.094.602.312,00** atau **99,25%** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 620.697.521,00** dengan realisasi **Rp. 616.334.704,00** atau **99,30%** serta belanja Modal sebesar **Rp. 26.832.740,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 26.832.740,00** atau **100 %.** (per 31 Desember 2022)

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan**

**Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kubu Raya**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)** | | | **Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| **1** | | | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8= (7/6)** | **9** | **10=(5+7+9)** | **11=(10/4)** |
| **PERMENDAGRI NO 13** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 11 | 01 |  | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **100%** | **100%** | **100%** | - | - | - | **100%** | **100%** |
| 4 | 01 | 11 | 01 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik Kantor | 36 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | - | - | - | 24 Bulan | 75% |
| 4 | 01 | 11 | 01 | 006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang patuh pembayaran pajak | 10 Kendaraan roda 2 | 5 Kendaraan roda 2 | 5 Kendaraan roda 2 | - | - | - | 5 Kendaraan roda 2 | 50% |
| 4 | 01 | 11 | 01 | 007 | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | Jumlah Kebutuhan Materai | 900 Lembar | 700 Lembar | 200 Lembar | - | - | - | 700 Lembar | 75% |
| 4 | 01 | 11 | 01 | 008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan yang terpenuhi | 9 Orang & 36 bulan | 6 Orang & 24 bulan | 3 Orang & 12 bulan | - | - | - | 6 Orang & 24 bulan | 75% |
| 4 | 01 | 11 | 01 | 010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Kebutuhan ATK Kantor | 36 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | - | - | - | 24 Bulan | 75% |
| 4 | 01 | 11 | 01 | 011 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor | 36 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | - | - | - | 24 Bulan | 75% |
| 4 | 01 | 11 | 01 | 012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor | Jumlah Kebutuhan Kelistrikan dan Penerangan Kantor | 36 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan | - | - | - | 24 Bulan | 75% |
| 4 | 01 | 11 | 01 | 015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan yang Terpenuhi | 1.080 Exp | 720 Exp | 360 Exp | - | - | - | 720 Exp | 75% |
| 4 | 01 | 11 | 01 | 017 | Penyediaan Makanan Minuman | Jumlah Rapat yang terpenuhi kebutuhan Makanan dan Minuman nya | 36 Kali | 24 Kali | 12 Kali | - | - | - | 24 Kali | 75% |
| 4 | 01 | 11 | 01 | 018 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah | 6 Kali | 4 Kali | 2 Kali | - | - | - | 4 Kali | 75% |
| 4 | 01 | 11 | 01 | 019 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah | 298 Kali | 106 Kali | 192 Kali | - | - | - | 106 Kali | 75% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **100%** | **100%** | **100%** | - | - | - | **100%** | **100%** |
|  |  |  |  |  | Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang terpenuhi | 4 unit | 4 unit | - | - | - | - | 4 unit | 75% |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi | 302 Unit | 52 Unit | 250 Unit | - | - | - | 52 Unit | 25% |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi | 16 Unit | 6 Unit | 10 Unit | - | - | - | 6 Unit | 75% |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Jumlah Unit yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | - | - | - | - | 12 Bulan | 100% |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas | Jumlah Unit yang dipelihara | 5 Unit | - | 5 Unit | - | - | - | 5 Unit | 0% |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer | Jumlah Unit yang dipelihara | 6 Unit | 3 Unit | 3 Unit | - | - | - | 3 Unit | 100% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **100%** | **100%** | **100%** | - | - | - | **100%** | **100%** |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang terpenuhi | 22 Stell | 22 Stell |  |  |  |  | 22 Stell | 100% |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian Batik yang terpenuhi | 22 Stel | 22 Stell | - | - | - | - | 22 Stell | 100% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **100%** | **100%** | - | - | - | - | **100%** | **100%** |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan | Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis | 6 Orang | 6 Orang | - | - | - | - | 6 Orang | 0% |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen yang tersusun | 1 Dokumen | - | 1Dokumen | - | - | - | - | 0% |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Evaluasi jabatan | Jumlah Dokumen yang tersusun | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | - | - | - | 0% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **PERSENTASE PENINGKATAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **100%** | **100%** | **100%** | - | - | - | **100%** | **100%** |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen yang tersusun | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen- | - | - | - | 2 Dokumen | 75% |
|  |  |  |  |  | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Jumlah Dokumen yang tersusun | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen- | - | - | - | 2 Dokumen | 75% |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Dokumen yang tersusun | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | 2 Dokumen | 75% |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Renja, Rka, DPA dan DPPA | Jumlah Dokumen yang tersusun | 12 Dokumen | 8 Dokumen | 4 Dokumen | - | - | - | 8 Dokumen | 75% |
|  |  |  |  |  | penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan LKPD | Jumlah Dokumen yang tersusun | 6 Dokumen | 4 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | 4 Dokumen | 75% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **PERSENTASE KETETAPAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN** | **100%** | **100%** | **100%** | - | - | - | **100%** | **100%** |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD | Jumlah Orang yang Mengikuti | 3 Orang | 3 Orang | - | - | - | - | 3 Orang | 100% |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi penataan aset pada SKPD | Jumlah Kegiatan yang terlaksana | 3 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | - | - | - | 2 Kegiatan | 75% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **PERSENTASE PENINGKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **100%** | **100%** | **100%** | - | - | - | **100%** | **100%** |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Rencana Straegis (Renstra) SKPD | Jumlah Dokumen yang tersusun | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | 1 Dokumen | 50% |
|  |  |  |  |  | Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan | Jumlah Dokumen yang tersusun | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | 2 Dokumen | 75% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH** | **PERSENTASE PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH** | **100%** | **100%** | **100%** | - | - | - | **100%** | **100%** |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Jumlah Doumen yang tersusun | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | 1 Dokumen | 50% |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Dokumen Dokumen Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | 2 Dokumen | 50% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN KECAMATAN** | **FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPATU KECAMATAN (PATEN)** | **100%** | **100%** | **100%** | - | - | - | **100%** | **100%** |
|  |  |  |  |  | Penataan Kearsipan | Jumlah kegiatan yang terlaksana | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kgiatan | - | - | - | 1 Kegiatan | 100% |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Profil Kecamatan | Jumlah Dokumen yang tersusun | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | 2 Dokumen | 75% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI** | **PERSENTASE TERLAKSANANYA WEB DIKECAMATAN** | **100%** | **100%** | **-** | - | - | - | **100%** | **100%** |
|  |  |  |  |  | Pembuatan Website | Jumlah Unit Web yang terpenuhi | 1 Website | 1 Website | - | - | - | - | 1 Website | 50% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA** | **JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA** | **3 Kegiatan** | **2 Kegiatan** | **1 Kegiatan** | - | - | - | **2 Kegiatan** | **75%** |
|  |  |  |  |  | Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah | Jumlah Kegiatan Yang terlaksana | 3 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | - | - | - | 2 Kegiatan | 75% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN** | **JUMLAH PEMUDA PELOPOR** | **100%** | **100%** | **100%** | - | - | - | **100%** | **100%** |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan | Jumlah Kegiatan yang terlaksana | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | - | - | - | 1 Kegiatan | 75% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA** | **PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA** | **100%** | **100%** | **100%** | - | - | - | **100%** | **100%** |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Lomba Desa | Jumlah Kegiatan yang terlaksana | 3 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | - | - | - | 2 Kegiatan | 75% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN** | **JUMLAH TITIK HOTSPOT** | **18 Titik** | **12 Titik** | 6 Titik | - | - | - | **12 Titik** | **75%** |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan | Jumlah Desa yang terbina | 18 Titik | 12 Titik | 6 Titik | - | - | - | 12 Titik | 75% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL UMAT BERAGAMA** | **JUMLAH KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIFASILITASI** | **1 Kegiatan** | **1 Kegiatan** | - | - | - | - | **1 Kegiatan** | **100%** |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan yang terlaksana | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | - | - | - | - | 1 Kegiatan | 100% |
|  |  |  |  |  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN KECAMATAN** | **FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPATU KECAMATAN (PATEN)** | **100%** | **100%** | **100%** | - | - | - | **100%** | **100%** |
|  |  |  |  |  | Pembinaan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang terbina | 18 Desa | 12 Desa | 6 Desa | - | - | - | 12 Desa | 75% |
|  |  |  |  |  | Pembinaan Sesial Kemasyarakatan | Jumlah Desa yang terbina | 18 Desa | 12 Desa | 6 Desa | - | - | - | 12 Desa | 75% |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan pembangunan | Jumlah Desa yang terbina | 18 Desa | 12 Desa | 6 Desa | - | - | - | 12 Desa | 75% |
|  |  |  |  |  | Pembinaan Ketentraman Ketertiban | Jumlah Desa yang terbina | 18 Desa | 12 Desa | 6 Desa | - | - | - | 12 Desa | 75% |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan | Jenis dokumen Pelayanan yang tersedia | 9 Jenis | 6 Jenis | 3 Jenis | - | - | - | 6 Jenis | 75% |
|  |  |  |  |  | Pelaksaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan yang terlaksana | 3 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | - | - | - | 2 Kegiatan | 75% |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi dan Pembinaan ADD | Jumlah Desa yang terbina | 18 Desa | 12 Desa | 6 Desa | - | - | - | 12 Desa | 75% |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi peningkatan pelayanan Perizinan | Jenis dokumen Pelayanan yang tersedia | 9 Jenis | 6 Jenis | 3 Jenis | - | - | - | 6 Jenis | 75% |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan | Jumlah kegiatan yang terlaksana | 3 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | - | - | - | 2 Kegiatan | 75% |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera | Jumlah kegiatan yang terlaksana | 3 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | - | - | - | 2 Kegiatan | 75% |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi penyelesaian tapal batas antar desa dalam kecamatan | Jumlah Desa yang terbina | 12 Desa | 6 Desa | 6 Desa | - | - | - | 6 Desa | 75% |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat | Jumlah kegiatan yang terlaksana | 3 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | - | - | - | 2 Kegiatan | 75% |
| **PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** |  |  |  |  | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **01** |  |  |  | **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **01** | **01** |  |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah** | **100%** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** |  | **Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100%** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA dan DPPA) | 10 Dokumen | - | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | 4 Dokumen | 9  Dokumen | 97% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen yang disusun (Laporan Kinerja) | 2 Dokumen | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang disusun (LPPD, SIPPD, ANJAB dan EVAJAB) | 8 Dokumen | - | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | 4 Dokumen | 8 Dokumen | 75% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** |  | **Administrasi keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN | Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji | 36 Orang / Bulan | - | 18 Orang / Bulan | 18 Orang / Bulan | 100% | 18 Orang / Bulan | 36 Orang / Bulan | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang / Bulan | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veriikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Veriikasi Keuangan SKPD | 24 Dokumen | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen yang disusun (LKPD) | 2 Dokumen | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD | Jumlah Dokumen yang disusun (LRA) | 2 Dokumen | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD | 26 Laporan | - | - | - | - | - | - | - |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** |  | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah** | **100%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | - | - | - | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 98% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | - | - | - | - | - | - | - |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | - | - | - | - | **100%** | **100%** | **100%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Yang dibuat | 18 Stel | - | - | - | - | 18 Stel | 18 Stel | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta AtribuKelengkapan | 18 Stel |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang | **-** | 3 Orang | 3 Orang | 100% | - | 3 Orang | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 6 Orang | **-** | - | **-** | **-** | - | **-** | - |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | - | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Kebutuhan Instalasi Listrik Kantor | 24 Bulan | - | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 6 Bulan | 18 Bulan | 75% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor | 24 Bulan | - | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 6 Bulan | 18 Bulan | 75% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 8 Paket | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan | 24 Bulan | - | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 6 Bulan | 18 Bulan | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratauran Perundang-undangan | Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 24 Bulan | - | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 6 Bulan | 18 Bulan | 49% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan | 585 Kali | - | 197 Kali | 197 Kali | 100% | 194 Kali | 391 Kali | 10% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 140 Laporan | - | - | - | - | - | - | - |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Pengadaan Barang Barang Milik Daerah** | **274 Unit** | **-** | **260 Unit** | **260 Unit** | **100%** | **3 Unit** | **3 Unit** | **100%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Unit yang terpenuhi | 1 Unit | - | - | - | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit yang terpenuhi | 260 Unit | **-** | 260 Unit | 260 Unit | 100% | - | - | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit yang terpenuhi | 2 Unit | **-** | - | **-** | **-** | 2 Unit | 2 Unit | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | **-** | - | **-** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | - | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **50%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik | Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24 Bulan | **-** | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 6 Bulan | 18 Bulan | 75% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Bulan | **-** | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 6 Bulan | 18 Bulan | 75% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | **-** | - | - | - | - | - | - |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | **47 Unit** | **-** | **8 Unit** | **8 Unit** | **100%** | **9 Unit** | **17 Unit** | **36%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan yang dibayarkan pajaknya | 9 Unit | **-** | 5 Unit | 5 Unit | 100% | 4 Unit | 9 Unit | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya | Jumlah Unit yang Dipelihara | 8 Unit | - | 3 Unit | 3 Unit | 100% | 5 Unit | 8 Unit | 75% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 Unit | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | - | - | - | - | - | - | - |
| **7** | **01** | **02** |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat** | **100%** | - | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **100%** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah dokumen yang tersusun | 2 Dokumen | **-** | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 75% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | **-** | - | - | - | - | - | - |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** |  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **100%** | - | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan | 3 dokumen | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 75% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Surat Rekomedasi yang dikeluarkan | 3 Laporan | **-** | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 2 Dokumen | 75% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 2 Laporan | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | 3 Kegiatan | **-** | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100% | 1 Kegiatan | 3 Dokumen | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 2 Laporan | **-** | - | - | - | - | - | - |
| **7** | **01** | **03** |  |  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **100%** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** |  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan** | **8 Kegiatan** | **-** | **2 Kegiatan** | **2 Kegiatan** | **100%** | **2 Kegiatan** | **4 Kegiatan** | **50%** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | 2 Kegiatan | - | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100% | 1 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 12 Lembaga Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | 2 Kegiatan | - | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100% | 1 Kegiatan | 2 Kegiatan | 75% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | - | - | - | - | - | - | - |
| **7** | **01** | **04** |  |  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100%** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **7** | **01** | **04** | **2.02** |  | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Jumlah Desa yang Dibina** | **24 Desa** | **-** | **6 Desa** | **6 Desa** | **100%** | **6 Desa** | **12 Desa** | **50%** |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan | 12 Kali | - | 6 Kali | 6 Kali | 100% | 6 Kali | 12 Kali | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 179 Laporan | - | - | - | - | - | - | - |
| **7** | **01** | **05** |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Pelaksanaan penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum** | **100%** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan** | **100%** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **50%** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan yang terlaksana | 2 Kegiatan | - | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100% | - | 1 Kegiatan | 50% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 300 Orang | - | - | - | - | - | - | - |
| **-7** | **01** | **06** |  |  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100%** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** |  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah Desa yang Dibina** | **24 Desa** | **-** | **6 Desa** | **6 Desa** | **100%** | **6 Desa** | **12 Desa** | **50%** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi | 12 Desa | - | 6 Desa | 6 Desa | 100% | 6 Desa | 12 Desa | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi | 12 Desa | - | 6 Desa | 6 Desa | 100% | 6 Desa | 12 Desa | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Desa yang Difasilitasi | 12 Desa | - | 6 Desa | 6 Desa | 100% | 6 Desa | 2 Desa | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi | 12 Desa | - | 6 Desa | 6 Desa | 100% | 6 Desa | 12 Desa | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Desa yang Difasilitasi | 12 Desa | - | 6 Desa | 6 Desa | 100% | 6 Desa | 12 Desa | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 192 Laporan | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas, tidak semua tingkat capaian target Renstra bisa dipersentasekan karena tidak konsistennya kegiatan setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai 2022.

Secara umum Recana Kerja (Renja) Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Kuala mandor B Tahun 2019-2024, sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

1. Kedudukan Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga penunjang yang membantu Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.

**Tabel 2.2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuala Mandor B**

**Kabupaten Kubu Raya**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
| Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| (Thn n-2) | (Thn n-1) | (Thn n) | (Thn n+1) | (Thn n-2) | (Thn n-1) | (Thn n) | (Thn n+1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |  |  | 81,37/ Sangat Baik | 81,43/ Sangat Baik | 81,52/ Sangat Baik | 82,00/ Sangat Baik | 81,65/  Sangat Baik | - | 81,52 / Sangat Baik | 82,00 / Sangat Baik |  |
| 2 | Nilai SAKIP |  |  | 74,31/ BB | 76,26 / BB | 78,00/ A | 80,00 / A | 61,70/BB | - | 78,00/ B | 80,00 / A | Penilaian untuk SAKIP Tahun 2022 belum ada penilaian |
| 3 | Jumlah Desa Mandiri |  |  | 1 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 0 | - | 1 Desa | 1 Desa | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Dari Target yang diharapkan terealisasi 0 Desa Mandiri di Kecamatan Kuala Mandor B sehingga Capaian Kinerja yang didapat 0 Desa. Karena berdasarkan data dari www.sid.kemendesa.go.id, bahwa status desa berdasarkan IDM untuk desa yang ada di Kecamatan Kuala Mandor | | |

* 1. **Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kecamatan Kuala Mandor B merupakan perangkat daerah kabupaten Kubu Raya sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kubu Raya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kecamatan Kuala Mandor Badalah wilayah kerja Camat Kuala Mandor Bsebagai perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dilimpahkan oleh Bupati Kubu Raya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kabupaten Kubu Raya. Sebagai organisasi pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kecamatan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kubu Raya yang disebut Kantor Camat Kuala Mandor B.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kuala mandor B Kabpaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan, antara lain:

1. Perencanaan belum didukung oleh data akurat dan dokumen perencanaan yang menampilkan kondisi lapangan khas Kubu Raya.
2. Sebagian besar aspirasi dan kebutuhan masyarakat belum tertampung dalam dokumen perencanaan, ini disebabkan antara lain karena harapan masyarakat yang telalu besar terhadap proses perencanaan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya dihadapkan pada persoalan keterbatasan sumber daya yang tersedia.
3. Kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memadai dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan
4. Sarana dan prasarana belum menunjang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sementara Pemerintah daerah dihadapkan pada tekad untuk tetap memprioritaskan pelayanan ke masyarakat dengan sarana prasarana penunjang seadanya.

Untuk mengoptimalkan capaian Kinerja Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya akan menempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur dalam perencana pembangunan;
2. Memberikan ruang bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis dan lain-lain;
3. Mengusulkan penambahan maupun perbaikan sarana prasarana kantor.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang;
5. Menambah jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan Kuala mandor B sehingga kegiatan yang terprogram dapat berjalan dengan lancar.

Selain permasalahan dan pemecahan permasalahannya, faktor-faktor yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan yang ada di Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya antara lain:

1. Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Kecamatan Kuala mandor B telah tertata dengan baik melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kuala Mandor B. Dengan demikian, pegawai dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mekanisme dan aturan yang telah tersedia.
2. Komitmen dan dedikasi pimpinan dan pegawai Kecamatan Kuala mandor B yang tinggi.

Pimpinan dan seluruh pegawai Kecamatan Kuala mandor B mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terutama untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang maju, harmonis, berbudaya dan memiliki daya saing.

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai Kecamatan Kuala mandor B, Pimpinan Kecamatan Kuala mandor B memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan staf/bawahannya (hubungan vertikal), begitu pula dengan sesama pegawai (hubungan horizontal). Rasa kebersamaan sebagai satu *team work* selalu dibina dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok Kecamatan Kuala mandor B.
2. Tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Kuala mandor B yang cukup memadai. Sebagian besar pegawai Kecamatan Kuala mandor B berpendidikan strata 1 (S1) dan Diploma (D3), kondisi ini memudahkan terjadinya transformasi informasi dari berbagai sumber sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan berkualitas.

Sementara faktor-faktor di Kecamatan Kuala mandor B yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki oleh Kecamatan Kuala mandor B adalah:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang berkompetensi perencanaan.
2. Sarana dan prasarana kerja yang belum mendukung.
3. Kondisi ruang kerja beberapa bidang kurang memadai.
   1. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

**Tabel 2.3**

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**

**Kabupaten Kubu Raya**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RANCANGAN AWAL RKPD** | | | | | | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | | | | | |
|  | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian Kinerja** | **Pagu Anggaran** |  | | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian Kinerja** | **Pagu Anggaran** |
|  | |
| **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |  | **UNSUR KEWILAYAHAN** | |  |  |  |  |  | |
| **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  |  |  | **3,115,587,839** | **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |  |  |  | **3,115,587,839** |  | |
| **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah** | **100%** | **2,707,840,347** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah** | **100%** | **2,707,840,347** |  | |
| **Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100%** | **36,243,301** | **Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100%** | **36,243,301** |  | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 17,506,800 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 17,506,800 |  | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 11,039,826 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 11,039,826 |  | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 7,696,675 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 7,696,675 |  | |
| **Administrasi keuangan Perangkat Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **2,310,681,330** | **Administrasi keuangan Perangkat Daerah** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **2,310,681,330** |  | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang / Bulan | 2,298,407,285 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang / Bulan | 2,298,407,285 |  | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Orang | 19,800,000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Orang | 19,800,000 |  | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 6,354,350 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 6,354,350 |  | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD | 1 Laporan | 1,599,695 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD | 1 Laporan | 1,599,695 |  | |
| **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah** | **100%** | **6,180,692** | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah** | **100%** | **6,180,692** |  | |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1,631,000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1,631,000 |  | |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 2,849,857 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 2,849,857 |  | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1,699,835 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1,699,835 |  | |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **58,400,000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **58,400,000** |  | |
| Pengadaan Pakaia Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 18 Paket | 23,400,000 | Pengadaan Pakaia Dinas beserta Atribut kelengkapannya | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 18 Paket | 23,400,000 |  | |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang | 35,000,000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang | 35,000,000 |  | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **184,335,024** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **184,335,024** |  | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 3,236,200 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Kec. Rasau Jaya | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 3,236,200 |  | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 65,802,279 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 65,802,279 |  | |
| Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 15,514,545 | Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 15,514,545 |  | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 177 Laporan | 99,782,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 177 Laporan | 99,782,000 |  | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah** | **8 Unit** | **53,960,288** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah** | **8 Unit** | **53,960,288** |  | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 56,000,000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 56,000,000 |  | |
| Pengadaan Mebel | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 10,000,000 | Pengadaan Mebel | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 10,000,000 |  | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 36,000,000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 36,000,000 |  | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 Unit | 10,000,000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Kec. Kuala Mandor B | Kec. Kuala Mandor B  Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 Unit | 10,000,000 |  | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2 Laporan** | **104,448,220** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2 Laporan** | **104,448,220** |  | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 19,200,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 19,200,000 |  | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 85,248,220 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 85,248,220 |  | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah Barang Milik Daerah** | **21 Unit** | **13,110,970** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah Barang Milik Daerah** | **21 Unit** | **13,110,970** |  | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 870,970 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 870,970 |  | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 Unit | 12,240,000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 Unit | 12,240,000 |  | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat** | **100%** | **64,381,540** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat** | **100%** | **64,381,540** |  | |
| **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **100%** | **6,511,380** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **100%** | **6,511,380** |  | |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 6,511,380 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 6,511,380 |  | |
| **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **100%** | **57,870,160** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **100%** | **57,870,160** |  | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 3,631,000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 3,631,000 |  | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | 3,431,000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | 3,431,000 |  | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | 50,608,160 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | 50,608,160 |  | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **100%** | **79,929,377** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **100%** | **79,929,377** |  | |
| **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan** | **2 Kegiatan** | **79,929,377** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan** | **2 Kegiatan** | **79,929,377** |  | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 6 Lembaga Masyarakat | 27,229,760 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 6 Lembaga Masyarakat | 27,229,760 |  | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 52,699,617 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 52,699,617 |  | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100%** | **34,662,000** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100%** | **34,662,000** |  | |
| **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah desa yang Dibina** | **6 Desa** | **34,662,000** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah desa yang Dibina** | **6 Desa** | **34,662,000** |  | |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 79 Laporan | 34,662,000 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 79 Laporan | 34,662,000 |  | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Pelaksanaan penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum** | **100%** | **63,906,075** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Pelaksanaan penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum** | **100%** | **63,906,075** |  | |
| **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan** | **1 Kegiatan** | **63,906,075** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan** | **1 Kegiatan** | **63,906,075** |  | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 448 Orang | 63,906,075 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 448 Orang | 63,906,075 |  | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100%** | **164,868,500** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100%** | **164,868,500** |  | |
| **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah desa yang Dibina** | **6 Desa** | **164,868,500** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | **Kec. Kuala Mandor B** | **Jumlah desa yang Dibina** | **6 Desa** | **164,868,500** |  | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 77,539,500 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 77,539,500 |  | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen | 3,350,000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen | 3,350,000 |  | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 Dokumen | 42,539,500 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 Dokumen | 42,539,500 |  | |
| Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dokumen | 2,900,000 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dokumen | 2,900,000 |  | |
| Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 84 Laporan | 38,539,500 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | Kec. Kuala Mandor B | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 84 Laporan | 38,539,500 |  | |
| **TOTAL** |  |  |  | **3,115,587,839** | **TOTAL** | |  |  |  | **3,115,587,839** |  | |

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023, Prioritas yang terkait dalam program adalah kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Untuk menjabarkan beberapa program perlu ditetapkan beberapa kegiatan pokok.

Adapun Usulan program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dan diprioritaskan pada usaha untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2023 Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**

**Kabupaten Kubu Raya**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Besaran/ Volume** | **Catatan (Pelaksana)** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | Jalan Poros Kuala Mandor A RT.01/RW.04 Dusun Karya Bersama Desa Kuala Mandor A (109.502) (0.03833), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 200 X 3 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 2 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | Jalan Poros Kuala Mandor A, RT.04/RW.04 Dusun Karya Bersama Desa Kuala Mandor A (109.609) (0.00961), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 230 x 3 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 3 | WC bangunan gedung yang rusak/belum tersedia | Desa Kuala Mandor A (109.596) (0.00739) (13 Unit), Kab. Kubu Raya | Jumlah WC yang diperbaiki/dibangun | 13 Unit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 4 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | Jalan Lingkungan RT.05/RW.01 Dusun Karya Usaha Desa Kuala Mandor A (109.501) (-0.03797), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 200 X 3 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 5 | Minimnya akses ke lahan pertanian (jalan usaha tani) | POktan Teluk Setak Dusun Karya Bersama RT.02/RW.06 Desa Kuala Mandor A (109.594) (0.00602), Kab. Kubu Raya | Jumlah Akses ke Lahan Pertanian yang dibangun | 200 X 3 Meter | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 6 | Bangunan gedung kesehatan yang rusak atau belum tersedia | dusun retok bebantek RT 002/RT 003(0,10446, 109,5029), Kab. Kubu Raya | Jumlah Gedung Sekolah yang diperbaiki/dibangun |  | Dinas Kesehatan |
| 7 | Bangunan gedung sekolah yang rusak atau belum tersedia | Tanjung Pasir Dusun Karya Bersama RT.01/ RW.05 Desa Kuala Mandor A (109.600) (0.0065), Kab. Kubu Raya | Jumlah Gedung Sekolah yang diperbaiki/dibangun | 6 Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 8 | Bangunan gedung kesehatan yang rusak atau belum tersedia | Jelau Dusun Karya Sejati RT.03/RW.09 (109.596) (0.00725), Kab. Kubu Raya | Jumlah Gedung Kesehatan yang diperbaiki/dibangun | 1 Unit | Dinas Kesehatan |
| 9 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | Dusun Jaya Sakti RT 002 Desa Kuala mandor B ( 0. 00443. 109. 48766. 31. 3m ), Kab. Kubu Raya | Jumlah Gedung Kesehatan yang diperbaiki/dibangun | 3 x 200 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 10 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | Dusun Maju Jaya RT/RW 007/003 ( 0. 0017. 109. 45757. 37. 9m, Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 1 x 200 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 11 | Minimnya akses ke lahan pertanian (jalan usaha tani) | Dusun Pelita Jaya RT/RW 009/001 ( -0. 01501. 109. 49947. 27. 7m ), Kab. Kubu Raya | Jumlah Akses ke Lahan Pertanian yang dibangun | 1 x 200 Meter | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 12 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | Dusun Pelita Jaya RT/RW 009/00-01 ( -0. 015. 109. 49946. 32. 1m ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 13 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | Dusun Pelita Jaya RT 009/001 ( -0. 01144. 109. 49514. 33. 7m ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 14 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | Dusun Pelita Jaya RT/RW 003/001 jalan Poros Desa Kuala Mandor B ( 0. 01604. 109. 50193. 32. 7m ), Kab. Kubu Raya | - | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 15 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | Dusun Pelita Jaya RT/RW 003/001 Jalan Poros Desa Kuala Mandor B ( 0. 02537. 109. 49585. 33m), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 8 x 3000 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 16 | Bangunan gedung sekolah yang rusak atau belum tersedia | Dusun Pelita Jaya RT/RW 006/001 Sekolah SMPN 1 Kuala Mandor B ( -0n. 001. 109. 49435. 30. 1m ), Kab. Kubu Raya | - | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 17 | Bangunan gedung kesehatan yang rusak atau belum tersedia | Dusun Maju Jaya RT/RW 002/003 Puskesmas Kuala Mandor B ( -0. 00539. 109. 46475. 33. 6m ), Kab. Kubu Raya | - | - | Dinas Kesehatan |
| 18 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | Dusun Jaya Sakti RT/RW 005/002 Sekolah SMKN 1 Kuala Mandor B ( -0. 00256. 109. 47497. 25. 0m ), Kab. Kubu Raya | - | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 19 | Bangunan gedung daerah kabupaten yang rusak/belum tersedia | Dusun Maju Jaya RT/RW 002/003 Kantor Camat Kuala Mandor B ( -0. 0''17,83645"S 109. 27''48,21037"E ), Kab. Kubu Raya | Jumlah Gedung Daerah kabupaten yang diperbaiki/dibangun | 5 x 30 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 20 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | Dusun Pelita Jaya RT/RW 003/001 Jalan Poros Desa Kuala Mandor B Menuju Desa Mega Timur ( -0. 0''51,57425"S 109. 25''29,20753"E ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 4 x 5000 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 21 | Saluran darinase yang rusak/belum tersedia | Dusun Maju Jaya RT/RW 002/003 Parit Abak ( -0. 0''17,53164"S 109. 28''3, 43294"E ), Kab. Kubu Raya | Jumlah Saluran darinase yang perbaiki/dibangun | 100 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 22 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | Dusun Maju Jaya RT/RW 002/003 Parit Abak (-0. 0''17,24346"S 109.28''3,49219"E ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 2 x 1000 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 23 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | Dusun Maju Jaya RT/RW 002/003 Parit Abak ( -0. 0''41,51135"S 109. 28''10,83623"E ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 3 x 3 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 24 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | jalan poros desa kubu padi dusun Karya abadi RT 001 R 006, Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 2,5x 200 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 25 | Pemeliharaan fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan | Dusun Karya Abadi RT 001 R 006, Kab. Kubu Raya | Jumlah fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan yang dipelihara | 6x8 Meter | Dinas Perhubungan |
| 26 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | Jalan Poros desa Kubu Padi dusun harapan bersama RT 005 RW 004, Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 2,5x 200 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 27 | Minimnya dukungan bibit ternak unggul untuk peningkatan populasi ternak | dusun harapan bersama RT 003 RW 004, Kab. Kubu Raya | Jumlah Bibit | 60x15000000 Ekor | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| 28 | Minimnya dukungan penggunaan sarana pendukung pertanian | Dusun Karya abadi RT001 RW 006, Kab. Kubu Raya | Jumlah ton | 5x30000000 Ton | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 29 | Minimnya dukungan bibit ternak unggul untuk peningkatan populasi ternak | Dusun Tunas Harapan RT 003 RW 002, Kab. Kubu Raya | Jumlah Bibit | 6000x10000 Ekor | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| 30 | Bangunan gedung sekolah yang rusak atau belum tersedia | Dusun Karya Abadi / Parit Dawa RT 004 RW 006, Kab. Kubu Raya | Jumlah Gedung Sekolah yang diperbaiki/dibangun | 3x150000000 Lokal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 31 | Bangunan gedung kesehatan yang rusak atau belum tersedia | dusun karya bersama RT 008 RW 001, Kab. Kubu Raya | Jumlah Gedung Kesehatan yang diperbaiki/dibangun | 1 Unit | Dinas Kesehatan |
| 32 | Kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana olahraga | Dusun Tunas Harapan Bersama RT 003 R 002, Kab. Kubu Raya | Jumlah Unit | 1 Unit | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata |
| 33 | SPAM Perdesaan yang rusak/belum tersedia | dusun Karya Abadi RT 001 RW 006, Kab. Kubu Raya | Jumlah SPAM Perdesaan yang diperbaiki/dibangun | 1 Unit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 34 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | Jalan Poros Desa Kubu Padi dusun karya abadi RT 005 Rw 006 ( Dawa ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 2,5x 200 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 35 | WC bangunan gedung yang rusak/belum tersedia | dusun harapan bersama RT 004 RW 004 Parit Bakti, Kab. Kubu Raya | Jumlah WC yang diperbaiki/dibangun | 1 Unit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 36 | Jaringan irigasi permukaan yang belum tersedia | ujung dusun tunas harapan, dusun harapan bersama dan dusun karya abadi, Kab. Kubu Raya | Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun | 15 Km | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 37 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | dusun karya bersama RT 005 RW 001 menuju RT 001 Rw 003 Dusun Karya Murni ( desa Persia[an Padi Jaya ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 1,5x 300 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 38 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | dusun karya murni RT 003 Rw 003 Menuju RT 005 Rw 003 ( Desa Persiapan Padi Jaya ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 1,5x 300 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 39 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | Jalan Dusun Karya Murni RT 005 Rw 003 Menuju Dusun Karya Indah RT 001 RW 005 ( desa Persiapan Padi Jaya ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 1,5x 300 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 40 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | dusun Tunas Harapan RT 003 Rw 002, Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 300 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 41 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | dusun tunas harapan menuju harapan bersama, Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 4x12 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 42 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | Dusun Harapan Bersama menuju dusun Karya Abadi, Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 4x12 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 43 | Bangunan gedung kesehatan yang rusak atau belum tersedia | dusun retok acin RT 001/RW 004(0,12195, 109,50819), Kab. Kubu Raya. | Jumlah Gedung Kesehatan yang diperbaiki/dibangun |  | Dinas Kesehatan |
| 44 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | jalan lingkungan dusun retok kuala RT 002/RW001 (0,10744, 109,48968), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan jembatan yang diperbaiki |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 45 | Keterbatasan benih unggul dan saprodi tanaman perkebunan | dusun karya abadi dan dusun harapan bersama, Kab. Kubu Raya | Jumlah Benih | 3 Kelompok | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| 46 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | jalan lingkungan dusun retok bebantek RT 005/RW 003 (0,10858, 109,48968), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki | 1000 Meter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 47 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | jalan lingkungan dusun retok acin RT 003/ RW 004 (0,13764, 109,50119), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 48 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | jalan lingkungan dusun memperigang RT 001/RW 007 (0,16244, 109,48971), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 49 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | jalan poros dusun retok bebantek RT 001/RW 003 (0,10933, 109,49854), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 50 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | jln. dusun retok bebantek rt 001 rw 003 ( 0,10933, 109,501193 ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 51 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | jalan lingkungan dusun retok memperigang rt 001 rw 007 ( 0,15815, 109,49345 ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 52 | Bangunan gedung sekolah yang rusak atau belum tersedia | dusun retok memperigang rt 001 rw 007 ( 0,176244, 109,48971 ), Kab. Kubu Raya | Jumlah Gedung Sekolah yang diperbaiki/dibangun |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 53 | Perlunya bantuan sarana dan prasarana kepada lembaga kebudayaan dan lembaga kesenian | dusun retok acin RT 001/RW 004 ( (0,11981, 109,5029), Kab. Kubu Raya | Jumlah sarana dan Prasarana Lembaga kebudayaan dan Lembaga kesenian |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 54 | Pemeliharaan fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan | dusun retok bebantek RT 004/RW 003 (0,11271, 109,49125), Kab. Kubu Raya | Jumlah fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan yang dipelihara |  | Dinas Perhubungan |
| 55 | Pemenuhan fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan | dusun retok retok kuala RT 001/RW 001 (0,08065, 109,49163), Kab. Kubu Raya | Jumlah fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan |  | Dinas Perhubungan |
| 56 | Minimnya dukungan bibit ternak unggul untuk peningkatan populasi ternak | dusun retok bebantek rt 005 rw 003 ( 0,10468, 169,49861 ), Kab. Kubu Raya | Jumlah fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan |  | Dinas Perikanan |
| 57 | Keterbatasan benih unggul dan saprodi tanaman perkebunan | dusun retok bebantek rt 003 rw 003 ( 0,10077, 109,50429 ), Kab. Kubu Raya | Jumlah Bibit |  | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| 58 | Minimnya dukungan bibit ternak unggul untuk peningkatan populasi ternak | dusun retok kuala rt 001 rw 001 ( 0,09295, 169,48031 ), Kab. Kubu Raya | Jumlah Bibit |  | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| 59 | Minimnya dukungan bibit ternak unggul untuk peningkatan populasi ternak | dusun retok bebantek rt 003 rw 003 ( 0,16699, 109,50404 ), Kab. Kubu Raya | Jumlah Bibit |  | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| 60 | Bantuan alat olahraga | Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kab Kubu Raya ( 0,0910N 109,4563E ), Kab. Kubu Raya | Jumlah Alat Olahraga |  | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata |
| 61 | Minimnya akses ke lahan pertanian (jalan usaha tani) | Desa Sungai Enau Dusun Padi Raya RT 004-005 RW 009 ( 0,1027N 109,4549 ), Kab. Kubu Raya | Jumlah akses ke lahan pertanian yang dibangun |  | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 62 | Minimnya dukungan sarana produksi tanaman padi | Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala mandor B Kab Kubu raya, Kab. Kubu Raya | Jumlah sarana produksi tanaman padi |  | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 63 | Bangunan gedung daerah kabupaten yang rusak/belum tersedia | Desa Sungai Enau Dusun Jaya Raya RT 001 RW 007 ( 0,09113, 109,45634 ), Kab. Kubu Raya | Jumlah Gedung daerah kabupaten yang diperbaiki/dibangun |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 64 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | Desa Sungai Enau Dusun Jaya Raya RT 004 RW 007 Parit Sriwijaya ( 0,0922N 109,4508E ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan jembatan yang diperbaiki/dibangun |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 65 | Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat | Desa sungai Enau Dusun Jaya Raya, Dusun Jaya RT 001 RW 007-RT 005 RW 008 ( 0,0919N 109,4517E ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan jembatan yang diperbaiki/dibangun |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 66 | Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak | Desa Sungai Enau Dusun Padi Raya RT 005 RW 007 Parit Rupi ( 0,1216N 109,4687E ), Kab. Kubu Raya | Jumlah jalan dan jembatan yang diperbaiki/dibangun |  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 67 | Perlunya bantuan sarana dan prasarana kepada lembaga kebudayaan dan lembaga kesenian | Desa Sungai Enau Dusun Jaya Raya RT 001 RW 007 ( 0,09113 109,45634, 3,2m ), Kab. Kubu Raya | Jumlah bantuan sarana dan prasarana Lembaga kebudayaan dan Lembaga kesenian |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 68 | Pemeliharaan fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan | Desa Sungai Enau Dusun jaya raya RT 003 RW 007 Parit Sriwijaya ( 0,0999N 109,4557E, Kab. Kubu Raya | Jumlah fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan yang dipelihara |  | Dinas Perhubungan |

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

* 1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten**

**3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kuala Mandor B dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa,.
2. serta mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

**3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten**

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka Visi yang ditetapkan SKPD Kantor Camat Kuala Mandor B adalah :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DAN PEMBINAAN APARATUR YANG BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU”**

Adapun maksud dan makna dari Visi Kecamatan Kuala Mandor B adalah sebagai berikut ;

1. **Terwujudnya** adalah Pencapaian yang diukur dari target indicator kinerja yang direncanakan.
2. **Pelayanan Publik Yang Optimal** adalah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai implentasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan benar.
3. **Pembinaan Aparatur yang Berkualitas** adalah memberikan motivasi demi terciptanya rasa tanggung jawab dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan serta peningkattan SDM Aparatur melalui bintek dan diklat
4. **Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih,serta memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Berdasarkan Visi Kabupaten Kubu Raya di atas maka oleh Bupati/Wakil Bupati Kubu Raya menetapkan Misi nya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal
4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi
   1. **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

**3.2.1 Tujuan.**

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dimaksud maka harus ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam perumusan rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dengan berpedoman pada kriteria yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Camat Kuala Mandor B Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **MISI** | **TUJUAN** |
| Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance* | Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa |
| Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal | Meningkatnya Kemandirian Desa |

**3.2.2 Sasaran Strategis**

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu ( tahunan, semesteran atau triwulan)

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

a. Spesifik;

b. Dapat dinilai dan terukur;

c. Menantang namun dapat dicapai;

d. Berorientasi pada hasil;

e. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Camat Kuala Mandor BTahun 2019– 2024 sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **TUJUAN** | **SASARAN STRATEGIS** |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan | Meningkatnya Nilai SAKIP |
| Meningkatkan Status Desa | Meningkatnya status desa |

**Tabel 3.1.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kuala Mandor B**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | | **Target Kinerja** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat | Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Meningkatnya Nilai IKM | 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80,00/A | 81,35/A | 81,37/A | 81,43/A | 81,52/A | 82,00/A |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 2 | Nilai SAKIP | 70,32 / BB | 72,66  / BB | 74,31 / BB | 76,26 / BB | 78,00 / BB | 80,00 / A |
| 3 | Meningkatnya Kemandirian Desa | Jumlah Desa Mandiri | Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri | 3 | Jumlah Desa Mandiri | 0 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 1 Desa |

* 1. **Program dan Kegiatan**

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda.

**Sasaran Pertama : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan**

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

Pada awal tahun 2021 terdapat 6 ( enam ) program , 11 ( sebelas ) kegiatan dan 27 (Sub Kegiatan) yang dianggarkan dengan rincian antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

* Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
* Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

* Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

* Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKDP
* Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
* Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

* Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
* Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

* Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
* Penyediaan Bahan Logistik Kantor
* Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
* Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
* Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

* Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
* Pengadaan Meubelair
* Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
* Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

* Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

* Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliaharan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
* Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Prangkat Daerah yang ada di Kecamatan

* Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

* Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan Non Usaha
* Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Nonperijinan
* Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

* Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
* Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

* Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

* Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara

1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

* Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
* Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
* Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
* Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
* Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

**Sasaran Kedua : Meningkatnya Status Desa di Kecamatan**

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM)

**Tabel 3.2**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**

**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

**Kabupaten Kubu Raya**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/ Kegiatan** | **Rencana Tahun 2023** | | | | | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | |
| **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | | **Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif** |
| **(1)** | | | | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| **7** |  |  |  |  | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **01** |  |  |  | **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  |  |  |  | **3,093,321,546** |  |  |  | **3,877,802,360** |
| **7** | **01** | **01** |  |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **100%** | **2,709,185,006** | **APBD** |  | **70 Poin** | **3,356,062,360** |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** |  | **Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **100%** | **27,242,800** | **APBD** |  | **14 Dokumen** | **76,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Kuala Mandor B |  | 5 Dokumen | 12,506,655 | APBD |  | 3 Dokumen | 22,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec. Kuala Mandor B |  |  |  | APBD |  | 1 Dokumen | 6,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD | Kec. Kuala Mandor B |  |  |  | APBD |  | 1 Dokumen | 6,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kec. Kuala Mandor B |  |  |  | APBD |  | 1 Dokumen | 6,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kec. Kuala Mandor B |  |  |  | APBD |  | 1 Dokumen | 6,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Laporan | 10,039,520 | APBD |  | 5 Laporan | 10,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Kuala Mandor B |  | 4 Laporan | 4,696,625 | APBD |  | 2 Laporan | 20,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** |  | **Administrasi keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **100%** | **2,333,872,378** | **APBD** |  | **33 Dokumen** | **2,376,262,360** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Kuala Mandor B |  | 16 Orang / Bulan | 2,278,138,738 | APBD |  | 15 Orang / Bulan | 2,342,262,360 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | **Kec. Kuala Mandor B** |  | 12 Dokumen | 44,880,000 | APBD |  | 4 Dokumen | 22,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Laporan | 7,354,245 | APBD |  | 1 Laporan | 7,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Laporan | 3,499,395 | APBD |  | 13 Laporan | 5,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** |  | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **100%** | **5,280,300** | **APBD** |  | **7 Dokumen** | **20,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Dokumen | 1,430,940 | APBD |  | 1 Dokumen | 5,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Dokumen | 2,349,540 | APBD |  | 1 Dokumen | 5,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec. Kuala Mandor B |  |  |  | APBD |  | 4 Laporan | 5,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Laporan | 1,499,820 | APBD |  | 1 Laporan | 5,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **100%** | **-** | **APBD** |  | **5 Orang** | **43,500,000** |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta AtribuKelengkapan | Kec. Kuala Mandor B |  | - | **-** | APBD |  | - | - |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Kuala Mandor B |  | 3 Orang | - | APBD |  | 5 Orang | 43,500,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kec. Kuala Mandor B |  | **100%** | **174,464,617**  - | **APBD** |  | **100%** | **242,250,000** |
| **7** | **01** | **01** | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kec. Kuala Mandor B |  | 2 Paket | 2,932,600 | APBD |  | 4 Paket | 9,500,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kec. Kuala Mandor B |  | 4 Paket | 62,800,517 | APBD |  | 8 Paket | 66,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kec. Kuala Mandor B |  | 4 Paket | 14,514,500 | APBD |  | 4 Paket | 14.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Kuala Mandor B |  | 174 Laporan | 94,217,000 | APBD |  | 250 Laporan | 152,750,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **5 Unit** | **52,993,548** | **APBD** |  | **30 Unit** | **182,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Unit | 29,478,400 | APBD |  | 3 Unit | 102,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Unit | 9,115,864 | APBD |  | 4 Unit | 25,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Unit | 14,499,000 | APBD |  | 6 Unit | 45,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kec. Kuala Mandor B |  | 2 Unit | - | APBD |  | 1 Unit | 10,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **2 Laporan** | **101,858,220** | **APBD** |  | **2 Laporan** | **151,300,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Laporan | 17,600,000 | APBD |  | 4 Laporan | 37,600,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Laporan | 84,258,220 | APBD |  | 18 Laporan | 113,700,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **33 Unit** | **10,965,810** | **APBD** |  | **25 Unit** | **264,750,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kec. Kuala Mandor B |  | 5 Unit | 725,810 | APBD |  | 6 Unit | 1,050,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kec. Kuala Mandor B |  | 16 Unit | 10,240,000 | APBD |  | 18 Unit | 13,700,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Kec. Kuala Mandor B |  | 12 Unit | - | APBD |  | 1 Unit | 250,000,000 |
| **7** | **01** | **02** |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **100%** | **56,281,540** | **APBD** |  | **84 poin** | **76,500,000** |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **100%** | **6,011,380** | **APBD** |  | **1 Laporan** | **6,500,000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Laporan | 6,011,380 | APBD |  | 1 Laporan | 6,500,000 |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** |  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **100%** | **50,270,160** | **APBD** |  | **1 Laporan** | **70,000,000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Dokumen | 3,431,000 | APBD |  | - | - |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Laporan | 3,431,000 | APBD |  | - | - |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Laporan | 43,408,160 | APBD |  | 1 Laporan | 70,000,000 |
| **7** | **01** | **03** |  |  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **100%** | **77,729,377** | **APBD** |  | **100%** | **95,000,000** |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** |  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **2 Kegiatan** | **77,729,377** | **APBD** |  | **2 Kegiatan** | **30,000,000** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Kuala Mandor B |  | 6 Lembaga Masyarakat | 26,029,760 | APBD |  | 6 Lembaga Masyarakat | 30,000,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Laporan | 51,699,617 | APBD |  | 1 Laporan | 65,000,000 |
| **7** | **01** | **04** |  |  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **100%** | **33,662,000** | **APBD** |  | **-** | **-** |
| **7** | **01** | **04** | **2.02** |  | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Jumlah desa yang Dibina** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **6 Desa** | **33,662,000** | **APBD** |  | **-** | **-** |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kec. Kuala Mandor B |  | 63 Laporan | 33,662,000 | APBD |  | - | - |
| **7** | **01** | **05** |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Pelaksanaan penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **100%** | **62,591,515** | **APBD** |  | **100%** | **74,600,000** |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **1 Kegiatan** | **62,591,515** | **APBD** |  | **1 Kegiatan** | **74,600,000** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kec. Kuala Mandor B |  | 300 Orang | 62,591,515 | APBD |  | 200 Orang | 35,000,000 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec. Kuala Mandor B |  | - | - | APBD |  | 4 Dokumen | 39,600,000 |
| **7** | **01** | **06** |  |  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **100%** | **157,018,500** | **APBD** |  | **100%** | **275,640,000** |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** |  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah desa yang Dibina** | **Kec. Kuala Mandor B** |  | **6 Desa** | **157,018,500** | **APBD** |  | **6 Desa** | **275,640,000** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Dokumen | 75,539,500 | APBD |  | 6 Dokumen | 61,860,000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Dokumen | 3,000,000 | APBD |  | 6 Dokumen | 5,000,000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Dokumen | 39,539,500 | APBD |  | 1 Dokumen | 32,739,500 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Kec. Kuala Mandor B |  | 1 Dokumen | 2,400,000 | APBD |  | 1 Dokumen | 2,900,000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kec. Kuala Mandor B |  | 96 Laporan | 36,539,500 | APBD |  | 96 Laporan | 31,339,500 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** |  |  |  |  | **3,093,321,546** |  |  | **-** | **3,248,317,070** |

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Tabel 4.1**

**Alokasi Anggaran Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2024**

**Kabupaten Kubu Raya**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | | | | | **PROGRAM/KEGIATAN** | **PAGU ANGGARAN** | **SUMBER DANA** |
|  |
| **7** |  |  |  |  | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |
| **7** | **01** |  |  |  | **KECAMATAN** | **2,828,525,911** |  |  |
| **7** | **01** | **01** |  |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **2,653,552,973** | APBD |  |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** |  | **Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **18,138,744** | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.088.039 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD | 5,931.800 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.881.938 | APBD |  |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** |  | **Administrasi keuangan Perangkat Daerah** | **1.976.071.109** | **APBD** |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN | 1.942.759.683 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD | 25.134.531 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.111.895 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD | 2.065.000 | APBD |  |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** |  | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **3,295,000** | **APBD** |  |
| **7** | **01** | **01** | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 448,000 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2,399,000 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 448,000 | APBD |  |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **11,531,250** | **APBD** |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 11,531,250 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - | APBD |  |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **134,447,844** | **APBD** |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,730,058 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 58.413.398 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | 14.670.388 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 59.634.000 | APBD |  |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **-** | **APBD** |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | - | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | APBD |  |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **158.040.380** | **APBD** |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik | 66.251.356 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 91.789.024 | APBD |  |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **11,230,972** | **APBD** |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 870,972 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya | 10,360,000 | APBD |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | APBD |  |
| **7** | **01** | **02** |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **35.351.894** | **APBD** |  |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **6,134,720** | **APBD** |  |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6,134,720 | APBD |  |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** |  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **29.217.174** | **APBD** |  |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 973.924 | APBD |  |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 1,200,000 | APBD |  |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 27,043,250 | APBD |  |
| **7** | **01** | **03** |  |  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **147.952.200** | **APBD** |  |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** |  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **147.952.200** | **APBD** |  |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 12,352,000 | APBD |  |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 135.600.200 | APBD |  |
| **7** | **01** | **04** |  |  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **22.312.000** | **APBD** |  |
| **7** | **01** | **04** | **2.02** |  | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **22.312.000** | **APBD** |  |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 22.312.000 | APBD |  |
| **7** | **01** | **05** |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **24.704.000** | **APBD** |  |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **24.704.000** | **APBD** |  |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 24.704.000 | APBD |  |
| **7** | **01** | **06** |  |  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **88.020.000** | **APBD** |  |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** |  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **88.020.000** | **APBD** |  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 50,160,000 | APBD |  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1,200,000 | APBD |  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 20.160.000 | APBD |  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1,200,000 | APBD |  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 15,300,000 | APBD |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **2,634,858,426** |  |  |

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2024. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara umum dan Kecamatan Kuala Mandor B secara khusus maka Renja Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Substansi Renja Kecamatan Kuala Mandor B disusun dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagi berikut :

1. Substansi Renja Kecamatan Kuala Mandor B disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Kuala Mandor B.

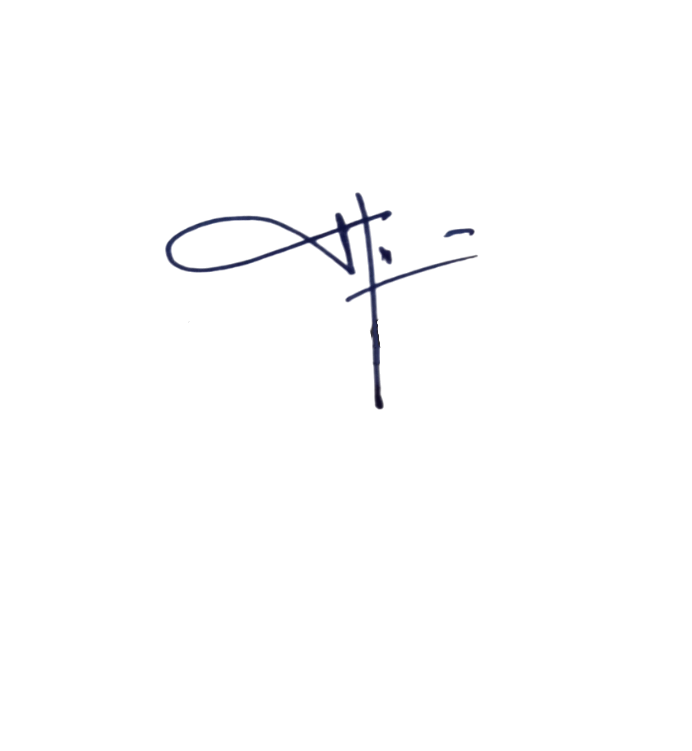
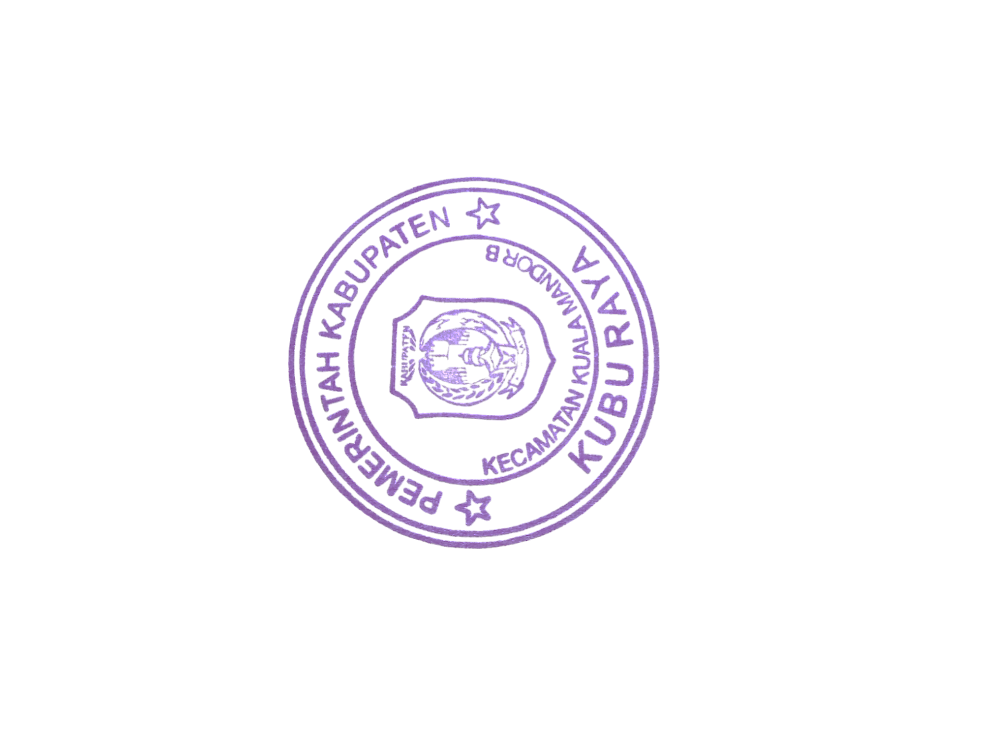
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Kecamatan Kuala Mandor B, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.

3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Kecamatan Kuala Mandor B, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.

4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Kecamatan Kuala Mandor B pada tahun 2024 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap, bahwa Renja Kecamatan Kuala Mandor B ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh targetan indikor kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan, sebagaian tata ruang dan statistik dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya,dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

 Demikian, dokumen Renja Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Mandor B, 2024

**CAMAT KUALA MANDOR B**

**MUHAMMAD, S.Sos., M.Si**

Pembina Tk I

NIP. 197304062006041006